

**UPAYA PENGENTASAN KEMISKINAN DENGAN PEMBERDAYAAN EKONOMI
MASYARAKAT (STUDY : PKL WARUNG MAKAN) DI KEC. GROGOL,
KABUPATEN SUKOHARJO**

Kusdiyanto

*Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta
Jl. A. Yani, Tromol Pos 1, Pabelan, Kartasura, Surakarta-57102
email: kusdiyanto@ums.ac.id*

Abstract

The main problem of this research is how government able to support both in capital and skill and empower potential toward the poor that have not become PKL. The purpose of this study is to see the profile of populations' poverty and effort of poverty alleviation by economical empowerment of society trough PKL (foot stall).

Method used in this researcher, the population is the whole PKL (Food Stall) in subdistrict of Grogol, Dati II Sukoharjo regency. Sampling technique used is MultiStage technique. From 14 villages in subdistrict of Grogol, it was taken 1 village (Langenharjo Village) with the greatest number of PKL used as analysis unit. Selection of subdistrict is dominated by poor citizens as analysis unit, while the selection of village is dominated by the greatest number of PKL that exist.

Research findings in this research are, before they were become PKL, 40% of them were working as farmer and Hodge with simple living (semi permanent house, second hand two-wheeled vehicle and some of them do not have it, and only able to educate their children until junior and senior high school), while the other (60%) were unemployed or as erratic worker (uncertain) with living in category of poor. After they become PKL (food stall), their lives become prosperous (owning proper home stay, lot of them already have their own vehicle even car, fixed income, and able to educate their children until university).

The group of PKL formation is in form of independent food stall. Their place to sale is in sidewalk during afternoon until midnight, by placing tents. The existence of Foodstall/Wedangan/Hik almost in every night is crowded by visitors, whether by car of motor circle, just like in: Wedangan Pak Item, Pak Gendut, Nasi Liwet Yu Sani, Ayam Bakar Mantili, and many other.

Keywords: *poverty, capital, skill, economical empowerment, PKL = food stall.*

a. PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan persoalan yang bersifat multidimensi yang harus dihadapi oleh bangsa Indonesia. Menurut BPS, pada tahun 2012, jumlah penduduk miskin Indonesia mencapai 36,146 juta jiwa (16,66% dari total jumlah penduduk). Kemiskinan di Indonesia juga ditandai dengan rendahnya mutu kehidupan masyarakat, yang diindikasikan oleh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Kemiskinan Manusia (IKM). IPM dan IKM mempunyai komponen yang sama, yaitu angka harapan hidup (tingkat kesehatan),

penguasaan ilmu pengetahuan (tingkat pendidikan) dan standar kehidupan yang layak (tingkat ekonomi),

Masalah utama yang harus dihadapi dan dipecahkan pada tahun 2013 adalah masih besarnya jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan. Dari total penduduk Kota Makmur: 895.107 jiwa, 328.473 diantaranya adalah warga miskin. Meski mengalami penurunan dibandingkan tahun 2011, persentase penduduk miskin di Kabupaten Sukoharjo pada 2012 mencapai 36,7 persen. Jika dihitung kepala keluarga (KK), 92.786 KK dari total 273.050 KK tercatat merupakan KK miskin (Sukoharjo Dalam Angka, 2012).

Upaya pengentasan kemiskinan tidak terlepas dari penciptaan stabilitas ekonomi, perluasan kesempatan kerja, peningkatan pendapatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Secara global, upaya pengentasan kemiskinan telah memperoleh momentum dan toleransi masyarakat global dengan disepakatinya tujuan *Millenium Development Goals* (MDGs). Hal ini tentu menjadi tanggungjawab bersama, yang merupakan kewajiban moral dan menjadi amanat konstitusi dimana dalam implementasinya tidak hanya ditangani oleh pemerintah namun melibatkan seluruh elemen masyarakat (penduduk).

Pemberdayaan ekonomi masyarakat dapat memberikan gambaran tentang seberapa besar masyarakat di daerah tersebut memiliki kesempatan untuk bekerja di sektor yang memiliki nilai tambah yang relatif cukup tinggi sesuai dengan tingkat ketrampilan (kemampuan) yang mereka miliki.. Penelitian tentang pengentasan kemiskinan dengan upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat dapat menunjukkan arah transformasi struktur ekonomi yang efektif untuk menurunkan tingkat kemiskinan.

Pokok masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Pemerintah dapat memberi bantuan baik modal maupun skill dan memperdayakan potensi kepada warga miskin yang yang belum terjun menjadi PKL? Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat profil kemiskinan penduduk dan upaya pengentasan kemiskinan dengan pemberdayaan ekonomi melalui PKL (Warung Makan).

b. TINJAUAN PUSTAKA

Kemiskinan

Kemiskinan yaitu penduduk yang hanya mampu memenuhi sebagian kebutuhan-kebutuhannya yang paling mendasar saja, seperti bahan pangan, sandang dan papan, sekedar demi mempertahankan taraf hidup yang minimum (Todaro dan Smith, 2003 : 359). Harta yang dimiliki seperti: rumah gedek bolong-bolong, makan nasi lauk garam, tidur seataap dengan ternak, lantai rumah tanah, dan sebagainya.

Fitchen (2005) menyatakan bahwa definisi kemiskinan dapat dikategorikan sebagai berikut

1. Kemiskinan berarti secara objektif memiliki lebih sedikit dari kebutuhan minimum absolut yang harus dipenuhi.
2. Kemiskinan adalah memiliki lebih sedikit dibandingkan dengan orang lain dalam suatu masyarakat.
3. Kemiskinan adalah perasaan bahwa tidak memiliki kecukupan untuk dapat terus hidup.

Kemiskinan menurut definisi kategori pertama adalah sesuatu yang absolute, sedangkan kategori kedua dapat merupakan sesuatu yang absolut dan relatif ataupun diantaranya. Kategori ketiga mendefinisikan kemiskinan dalam situasi subjektif, sedangkan kategori pertama dan kedua mendefinisikannya secara objektif.

Pendekatan pertama yang digunakan untuk mendefinisikan kemiskinan menggunakan penilaian moneter dalam pengukurannya yaitu terhadap besarnya pendapatan atau konsumsi rumah tangga. Menurut definisi ini, penduduk dikatakan miskin jika dan hanya jika mereka tidak memiliki pendapatan yang cukup untuk menikmati tingkat kesejahteraan tertentu. Jika pendapatan atau konsumsi mereka tidak melewati garis kemiskinan yang telah ditetapkan, maka mereka dikatakan miskin.

Pendekatan kedua yang sebagian besar dikembangkan oleh *United Nations Children's Fund (UNICEF)* mendefinisikan kemiskinan sebagai ketidakmilikan hal-hal yang secara materi merupakan kebutuhan minimal manusia, termasuk makanan. Definisi ini lebih luas dari definisi pertama karena memasukkan pula kebutuhan terhadap kesehatan dasar, pendidikan, dan jasa-jasa penting lain yang dapat menghindarkan masyarakat dari kemiskinan.

Sayogio dalam studinya selama bertahun-tahun menggunakan suatu garis kemiskinan yang berdasar pada harga beras. Garis kemiskinan versi Sayogio adalah nilai Rupiah setara 20 kg beras untuk daerah pedesaan sedangkan 30 kg beras untuk daerah perkotaan. Ukuran lainnya juga dilakukan oleh Hendra Esmara yang menetapkan garis kemiskinan pedesaan dan perkotaan dipandang dari sudut pandang aktual pada kelompok barang dan jasa esensial (Danusaputro, 2006).

Blank (2004) menguraikan konsepnya tentang berbagai pemberdayaan ekonomi yang berpotensi mengatasi tingkat kemiskinan dan kebijakan yang mempengaruhinya. Pemberdayaan ekonomi tersebut adalah: struktur ekonomi, kelembagaan publik dan masyarakat, norma-norma sosial dan lingkungan sosial yang ada, dan karakteristik demografi penduduk suatu daerah lokal.

World Bank (2005) menjelaskan beberapa karakteristik penduduk miskin yang diantaranya meliputi kemiskinan desa-kota, demografi, kepemilikan aset, dan sumber-sumber pendapatan mereka. Masalah kemiskinan biasanya lebih buruk di daerah pedesaan dibandingkan perkotaan. Pada umumnya lokasi tempat tinggal mereka terdapat di daerah-daerah yang kurang subur, produktivitas pertanian rendah, daerah bencana, banjir, dan gampang terjadi degradasi lingkungan.

Definisi kemiskinan yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada definisi menurut BPS Indonesia ditambah versi Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, yaitu penduduk yang hanya mampu memenuhi sebagian kebutuhan-kebutuhannya yang paling mendasar saja, seperti bahan pangan, sandang dan papan, sekedar demi mempertahankan taraf hidup yang minimum. Harta yang dimiliki seperti: rumah gedek bolong-bolong, makan nasi lauk garam, tidur seataap dengan ternak, lantai rumah tanah, dan sebagainya.

Faktor-faktor Penyebab Kemiskinan

Berdasarkan penyebabnya, kemiskinan dapat dikategorikan menjadi:

1. Kemiskinan struktural. Penyebab kemiskinan struktural adalah yang berhubungan dengan kebijakan pemerintah, perundang-undangan, dan pelaku birokrasi yang menghambat produktivitas dan mobilitas masyarakat
2. Penyebab kultural, yaitu yang berkaitan dengan adanya nilai-nilai yang tidak produktif, seperti pemahaman umat beragama (tentang ajaran agama), lingkungan ekologis, nilai-nilai budaya, nilai-nilai sosial, tingkat pendidikan rendah, kondisi kesehatan dan gizi yang buruk.
3. Penyebab alamiah yang ditunjukkan oleh kondisi alam dan geografis, misalnya keterisolasi daerah.

Berkaitan dengan berbagai faktor penyebab kemiskinan di atas, maka upaya pengentasan kemiskinan dapat dikelompokkan menjadi 4 (empat) kategori kebijakan yang diselenggarakan secara terpadu, yaitu :

1. Kebijakan perluasan kesempatan kerja, yaitu berkaitan dengan penciptaan lapangan kerja dan lingkungan yang kondusif dalam rangka pengentasan kemiskinan.
2. Kebijakan pemberdayaan ekonomi masyarakat, yaitu berkaitan dengan upaya penguatan ekonomi masyarakat beserta organisasi dan kelembagaannya untuk mampu terlibat dalam pengambilan kebijakan dan perencanaan publik.

3. Kebijakan peningkatan kemampuan yang berkaitan dengan upaya peningkatan kemampuan dasar masyarakat miskin untuk meningkatkan pendapatan melalui langkah-langkah perbaikan kesehatan dan pendidikan, peningkatan ketrampilan usaha, permodalan, prasarana, teknologi, serta informasi pasar.

Pemberdayaan Ekonomi

Pemberdayaan didefinisikan sebagai membantu masyarakat agar mampu membantu diri mereka sendiri (*help people to help themselves*). Pemberdayaan dilakukan dengan memberikan ruang dan kapasitas masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dan hak-hak mereka, mengembangkan potensi dan prakarsa lokal, mengaktifkan peran masyarakat serta membangun kemandirian masyarakat.

Pemberdayaan ekonomi merupakan proses dimana masyarakat khususnya yang kurang memiliki akses kepada sumber daya ekonomi didorong untuk meningkatkan kemandirian dalam mengembangkan perikehidupan mereka (Blank, 2004). Dengan kata lain pemberdayaan ekonomi adalah membantu masyarakat secara ekonomi agar mampu menghidupi diri mereka sendiri dan keluarganya.

Ada beberapa isu sentral yang menjadi fokus perhatian bagi upaya penanggulangan kemiskinan, yakni sebagai berikut :

1. Upaya penanggulangan kemiskinan harus bersifat lokal specific. Maksudnya bahwa penanggulangan kemiskinan harus dapat dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat lokal sesuai dengan kondisi di daerah tersebut.
2. Upaya penanggulangan kemiskinan harus dilaksanakan dengan pendekatan pembangunan ekonomi rumah tangga.
3. Program penanggulangan kemiskinan harus merupakan program pembangunan yang produktif dan memberi sumbangan terhadap peningkatan pendapatan masyarakat miskin di tingkat akar rumput secara berkelanjutan dan dengan pendampingan yang intensif.
4. Penanggulangan kemiskinan merupakan gerakan masyarakat yang dilakukan sendiri oleh masyarakat dan hasilnya untuk masyarakat penduduk miskin sebagai pelaku penanggulangan kemiskinan

Untuk melaksanakan upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat diperlukan suatu transformasi peranan pemerintah daerah dari inisiator berubah menjadi fasilitator. Upaya pemberdayaan ekonomi dapat dilihat dari 3 (tiga) sisi, yaitu antara lain :

1. Menciptakan suasana yang memungkinkan potensi ekonomi masyarakat berkembang (*enabling*), dalam arti adanya pemihakan kepada masyarakat untuk maju dan berkembang dalam ekonominya karena pada dasarnya setiap manusia/masyarakat mempunyai potensi

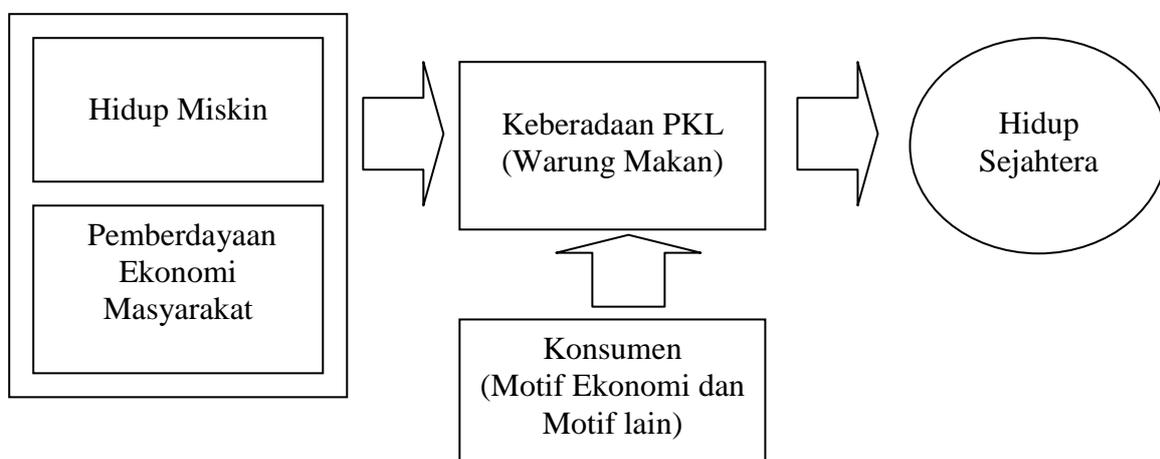
ekonomi yang dapat dikembangkan. Sehingga pengertian pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah suatu upaya untuk membangun daya ekonomi yang dimiliki oleh masyarakat serta mengembangkan potensi yang ada.

2. Memperkuat potensi ekonomi yang dimiliki masyarakat (*empowering*) dengan kata kunci melakukan penyiapan. Untuk tujuan ini, Pemerintah Daerah perlu untuk menciptakan iklim dan suasana perekonomian yang kondusif, meliputi langkah-langkah nyata yang menyangkut prioritas penyediaan bantuan modal bagi golongan ekonomi lemah, penyediaan lapangan kerja yang luas, bantuan pemasaran produk golongan ekonomi lemah, dsb.

Memberdayakan ekonomi mengandung makna melindungi (kata kuncinya adalah perlindungan kepada masyarakat). Dalam proses pemberdayaan ekonomi harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah karena ketidakberdayaan dalam menghadapi yang kuat.

Kebijakannya dalam pemberdayaan ekonomi rakyat adalah: (1) Pemberian peluang atau akses yang lebih besar kepada aset produksi (khususnya modal); (2) Memperkuat posisi transaksi dan kemitraan usaha ekonomi rakyat, agar pelaku ekonomi rakyat bukan sekadar *price taker*; (3) Pelayanan pendidikan dan kesehatan; (4) Penguatan industri kecil; dan (5) Mendorong munculnya wirausaha baru (PKL).

Kerangka Pemikiran



GAMBAR 1 PENGENTASAN KEMISKINAN DENGAN PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT(PKL = WARUNG MAKAN)

Berdasarkan Gambar 1 tersebut, dapat diketahui bahwadari sisi pedagang, sebelum meraka terjun ke PKL kehidupan mereka masuk dalam golongan atau kelompok penduduk miskin, yang ditandai dengan 40 % (rumah tempat tinggal semi permanen, kendaraan roda dua setengah pakai dan ada yang belum punya, dan hanya mampu membiayai anak sekolah

hingga SLTP atau SLTA), sedang yang lainnya (60%) tidak punya pekerjaan (pengangguran) atau bekerja yang tidak menentu (tidak tetap) dengan kehidupan masuk dalam kategori miskin.

Dari sisi konsumen, pembeli yang datang ke warung makan, tidak hanya semata-mata didorong oleh motif ekonomi (hanya membeli makanan atau minuman), tetapi juga didorong oleh motif yang lain, yaitu membutuhkan tempat yang nyaman untuk bersantai, mengobrol, dan berdiskusi. Kebanyakan pembeli merasa nyaman untuk singgah berlama-lama di warung makan. Hal tersebut disebabkan, disamping minuman dan jajanan yang disajikan cukup bervariasi dan dapat memesan jajanan yang dibakar, mereka juga dapat memilih tempat duduk yang disukai untuk bersantai, baik di kursi yang telah disediakan ataupun tempat duduk lesehan di trotoar dengan beralaskan tikar.

Setelah mereka terjun menjadi PKL (Warung Makan) kehidupan mereka berangsur-angsur membaik dan sekarang sudah menjadi hidup sejahtera (punya tempat tinggal layak atau permanen, punya kendaraan bahkan banyak yang sudah punya mobil, penghasilan tetap, dan mampu membiayai anak sekolah hingga Perguruan Tinggi).

c. METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel

Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh PKL (Warung Makan) di Kec. Grogol, Kabupaten Dati II Sukoharjo. Kabupaten Sukoharjo terdiri dari 12 Kecamatan (Weru, Bulu, Tawang Sari, Sukoharjo, Nguter, Bendosari, Polokarto, Mojolaban, Grogol, Baki, Gatak, dan Kartasura). Sedang Kec. Grogol terdiri dari 14 Desa (Pondok, Gedangan, Parangjoro, Manang, Kedokan, Banaran, Sanggrahan, Cemani, Madegondo, Grogol, Langenharjo, Kwarasan Pandeyan, Telukan). Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Multi stage* (gugus bertahap), yaitu Pengambilan sampel dilakukan secara bertahap berdasarkan wilayah-wilayah yang ada. Dari 14 Desa yang ada, diambil satu Desa yang paling banyak keberadaan PKL nya, yaitu Desa Langenharjo digunakan sebagai unit analisis (sepanjang jalan Raya Solo Baru).

Jumlah populasi sebanyak 38 Pedagang Warung Makan malam hari digunakan sebagai obyek penelitian dan dijadikan sampel semua (sebagai data primer), dengan pertimbangan karena jumlah populasinya tidak terlalu banyak dan bisa dijangkau untuk dijadikan sebagai obyek penelitian. Data primer diperoleh dari pernyataan PKL (Warung Makan) atas perkembangan formulasi pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam pengentasan kemiskinan. Sedang data sekunder diperoleh dari Kantor Bappeda

(Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya), Badan Pusat Statistik Kabupaten Sukoharjo, dan PT. Pondok Solo Permai.

d. HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Berbagai upaya telah dilaksanakan dalam rangka pengentasan kemiskinan antara lain melalui program jaringan sosial dan program pengentasan kemiskinan baik melalui kebijakan struktural, regional maupun yang telah dilaksanakan yaitu Program Inpres Desa Tertinggal (IDT), Program Pengembangan Kecamatan (PPK), P3DT (Pembangunan Prasarana Pendukung Desa Tertinggal), PDMDKE (Pemberdayaan Daerah Mengatasi Dampak Krisis Ekonomi), dan Program Pembangunan Daerah Sektoral telah berhasil memperkecil tingkat kemiskinan. Namun, penurunan tersebut masih rentan terhadap perubahan kondisi sosial, ekonomi dan politik nasional.

Keberadaan PKL (Warung Makan) di Kecamatan Grogol itu sendiri jumlahnya juga tidak diketahui, karena belum terorganisir semua, makasampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah PKL (Warung Makan) di sepanjang jalan Raya Solo Baru yang dikelola (diorganisir) oleh PT. Pondok Solo Permai (PSP). Adapun daftar PKL (Warung Makan) yang telah dikelola oleh PT. Pondok Solo Permai seperti terlihat pada Tabel 1 berikut.

TABEL 1 DAFTAR PKL (WARUNG MAKAN) MALAM HARI YANG DIKELOLA
OLEH PT. PONDOK SOLO PERMAI

NO	NAMA/JENIS	LOKASI	IURAN/HARI
1	Eko D/Tisada Burger	Barat Atrium	Rp. 7.000
2	Sukardi/Sate Jamu	Barat Atrium	Rp. 3.500
3	Ali/Susu Segar	Plasa	Rp. 3.500
4	Takin/Bakmi Goreng	Plasa	Rp. 3.500
5	Reno/Kare Ayam	Blok AC-20	Rp. 3.500
6	Glory/Sate Babi	Blok AC-14	Rp. 3.500
7	Tukinem/Nasi Liwet	Blok AC-12	Rp. 3.500
8	Heri/Sop Kambing	Blok AC-7	Rp. 3.500
9	Nahrowi/Martabak	Blok AB-18	Rp. 3.500
10	Mondol/Bakmi Goreng	Blok AB-16	Rp. 3.500
11	Narto/Sate Jamu	Blok AB-14	Rp. 3.500
12	Endang/Nasi Liwet	Blok AB-12A	Rp. 3.500
13	Yanto/Nasi Liwet	Blok AB-10	Rp. 3.500
14	Mulyono/Bakso	Blok AB-3	Rp. 3.500
15	Syarif/Sate Ayam	Blok AB-2	Rp. 3.500
16	Saiman/Ayam Goreng	Blok AA ½	Rp. 7.000
17	Netty/Bakmi Goreng	Blok AA 3/6	Rp. 15.000
18	Bambang/Mie Ayam	Blok AA-8	Rp. 3.500

Lanjutan Tabel 1			
NO	NAMA/JENIS	LOKASI	IURAN/HARI
19	Sutardi/Bakmi Goreng	Blok AA 16	Rp. 3.500
20	Alex/Susu Segar	Barat Gereja	Rp. 3.500
21	Fitri/Ayam Goreng	Blok B-3	Rp. 3.500
22	Yakumi/Masakan Jepang	Blok B-6	Rp. 3.500
23	Suharti/Ayam Presto	Blok B-19	Rp. 3.500
24	Sriyanto/Solo	Blok B-21	Rp. 3.500
25	Widodo/Martabak	Blok B-22	Rp. 3.500
26	Hary/Bestik	Blok B-24	Rp. 3.500
27	Joko/Wedangan	Blok C 7/8	Rp. 7.000
28	Sani/Nasi Liwet	Selatan Atrium	Rp. 3.500
29	Sri/Nasi Liwet	Selatan Atrium	Rp. 7.000
30	Udin/Susu Segar	Selatan Atrium	Rp. 3.500
31	Budi/Ayam Goreng	Selatan Atrium	Rp. 7.000
32	Mantili/Ayam Goreng	Selatan Atrium	Rp. 7.000
33	Narwan/Ayam Goreng	Selatan Atrium	Rp. 3.500
34	Suyanto/Susu & Ayam	Selatan Atrium	Rp. 7.000
35	Bu Sum/Nasi Liwet	Selatan Atrium	Rp. 3.500
36	Sri Widodo/Ayam Goreng	Selatan Atrium	Rp. 3.500
37	Heri/Sea Food	Selatan Atrium	Rp. 7.000
38	Susanto/Bebek Goreng	Selatan Atrium	Rp. 3.500

Sumber : PT. Pondok Solo Permai Kec. Grogol Kabupaten Sukoharjo 2013.

Berdasarkan pada Tabel 1 diketahui bahwa, mereka terjun menjadi PKL sudah lebih dari 5 tahun. Sebelum mereka terjun menjadi PKL, sebagian (40%) mereka bekerja sebagai petani dan buruh tani dengan kehidupan yang sederhana (rumah tempat tinggal semi permanen, kendaraan roda dua setengah pakai dan ada yang belum punya, dan hanya mampu membiayai anak sekolah hingga SLTP atau SLTA), sedang yang lainnya (60%) tidak punya pekerjaan (pengangguran) atau bekerja yang tidak menentu (tidak tetap) dengan kehidupan masuk dalam kategori miskin.

Setelah mereka terjun menjadi PKL (Warung Makan) kehidupan mereka berangsur-angsur membaik dan sekarang sudah menjadi hidup sejahtera (punya tempat tinggal layak atau permanen, punya kendaraan bahkan banyak yang sudah punya mobil, penghasilan tetap, dan mampu membiayai anak sekolah hingga Perguruan Tinggi).

Kemampuan untuk berkembang dan bertahan menghadapi persaingan usaha tersebut, disamping didorong faktor ketrampilan dan semangat kerja yang tinggi, juga didorong dengan berperannya modal sosial di antara pedagang warung makan, wedangan, atau HIK. Modal sosial yang telah berperan pada para pedagang warung makan, wedangan, atau HIK adalah saling memberikan informasi dan bantuan, baik terkait dengan informasi peluang usaha, lokasi usaha yang startegis, modal usaha, kelompok usaha maupun tempat tinggal.

Terbentuknya kelompok PKL berupa warung makan yang mandiri. Tempat berjualan mereka di pinggir-pinggir jalan (trotoar) pada waktu sore sampai dengan malam hari, dengan memasang tenda-tenda. Keberadaan PKL (Warung Makan) mampu menyerap banyak tenaga kerja dan memenuhi kebutuhan konsumen, sehingga dapat membantu Pemerintah untuk menekan jumlah pengangguran dan ke luar dari krisis ekonomi. Seperti terlihat di desa Langenharjo, Kecamatan Grogol (sepanjang jalan Raya Solo Baru). Warung Makan/Wedangan/HIK hampir setiap malam dipadati oleh pengunjung, baik dengan mobil maupun sepeda motor, seperti: wedangan Pak item, Pak Gendut, nasi liwet Yu Sani, Ayam bakar Mantili, dan masih banyak lagi yang lainnya.

Penguatan Kelembagaan

Pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin (lemah), pada mulanya dilakukan melalui pendekatan individual. Pendekatan individual ini tidak memberikan hasil yang memuaskan, oleh sebab itu, pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan kelompok. Alasannya adalah, akumulasi kapital akan sulit dicapai di kalangan orang miskin, oleh sebab itu akumulasi kapital harus dilakukan bersama-sama dalam wadah kelompok atau usaha bersama. Demikian pula dengan masalah distribusi, orang miskin mustahil dapat mengendalikan distribusi hasil produksi dan input produksi, secara individual. Melalui kelompok, mereka dapat membangun kekuatan untuk ikut menentukan distribusi.

Pada tahun 2010 di Sukoharjo yang pernah memiliki pendampingan kelompok usaha ekonomi sampai lebih dari seratus kelompok usaha bersama. Ketika kelompok tersebut didampingi oleh fasilitator dan diberi bantuan modal bergulir, aktivitas ekonomi melalui kelompok berjalan cukup baik. Tetapi ketika ditinggalkan pendampingnya dan tidak ada lagi bantuan modal, maka kelompok-kelompok ini akhirnya bubar.

Apabila pendekatan kelompok dimaksudkan untuk tujuan akumulasi modal atau membangun kelembagaan keuangan tersendiri, maka itu tidak mudah untuk mencapainya. Yang paling realistis adalah bila pengelompokan atau pengorganisasian ekonomi diarahkan pada kemudahan untuk memperoleh akses modal ke lembaga keuangan yang telah ada, dan untuk membangun skala usaha yang ekonomis.

Aspek kelembagaan yang lain adalah dalam hal kemitraan antar skala usaha dan jenis usaha, pasar kuliner, dan pasar kelontong. Ketiga aspek kelembagaan ini penting untuk ditangani dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Modal dan Ketrampilan (*Skill*)

Salah satu aspek permasalahan yang dihadapi masyarakat tuna daya adalah permodalan. Lambannya akumulasi kapital di kalangan pengusaha mikro, kecil, dan menengah, merupakan salah satu penyebab lambannya laju perkembangan usaha dan rendahnya surplus usaha di sektor usaha mikro, kecil dan menengah. Faktor modal juga menjadi salah satu sebab tidak munculnya usaha-usaha baru di luar sektor ekstraktif. Oleh sebab itu tidak salah, kalau dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat, pemecahan dalam aspek modal ini penting dan memang harus dilakukan.

Ada dua hal yang perlu kita cermati bersama. *Pertama*, bahwa lemahnya ekonomi masyarakat tunadaya ini bukan hanya terjadi pada masyarakat yang memiliki usaha mikro, kecil, dan menengah, tetapi juga masyarakat yang tidak memiliki faktor produksi, atau masyarakat yang pendapatannya hanya dari upah/gaji. Karena tidak mungkin semua anggota masyarakat tunadaya dapat dan memiliki talenta untuk dijadikan pengusaha, maka bantuan modal tidak akan dapat menjawab permasalahan yang dihadapi masyarakat pekerja. Dalam praktik pemberdayaan ekonomi masyarakat, tampaknya pemberdayaan untuk masyarakat pekerja ini perlu dipikirkan bersama.

Kedua, yang perlu dicermati dalam usaha pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui aspek permodalan ini adalah: (1) bagaimana pemberian bantuan modal ini tidak menimbulkan ketergantungan masyarakat; (2) bagaimana pemecahan aspek modal ini dilakukan melalui penciptaan sistem yang kondusif baru usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah untuk mendapatkan akses di lembaga keuangan; (3) bagaimana skema penggunaan atau kebijakan pengalokasian modal ini tidak terjebak pada perekonomian subsisten atau ekonomi *kere*. Tiga hal ini penting untuk dipecahkan bersama.

Inti pemberdayaan adalah kemandirian masyarakat. Pemberian hibah modal kepada masyarakat, selain kurang mendidik masyarakat untuk bertanggungjawab kepada dirinya sendiri, juga akan dapat mendistorsi pasar uang. Oleh sebab itu, cara yang cukup elegan dalam memfasilitasi pemecahan masalah permodalan untuk usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah, adalah dengan menjamin kredit mereka di lembaga keuangan yang ada, dan atau memberi subsidi bunga atas pinjaman mereka di lembaga keuangan. Cara ini selain mendidik mereka untuk bertanggung jawab terhadap pengembalian kredit, juga dapat menjadi wahana bagi mereka untuk terbiasa bekerjasama dengan lembaga keuangan yang ada, serta membuktikan kepada lembaga keuangan bahwa tidak ada alasan untuk diskriminatif dalam pemberian pinjaman.

Melihat potensi perkembangan usaha warung makanan di desa terutama di sektor informal (PKL). Sayangnya mereka kesulitan mendapatkan akses modal, pembinaan, dan pelatihan. Untuk itu, maka kebijakan atau bantuan pemerintah sangat diperlukan. Sebelum mereka terjun ke dunia kerja (menjadi PKL) di samping ketrampilan (*skill*) adalah permodalan. Lambannya akumulasi modal di kalangan pengusaha mikro, kecil, dan menengah, merupakan salah satu penyebab lambannya laju perkembangan usaha dan rendahnya surplus usaha. Oleh sebab itu tidak salah, kalau dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat, pemecahan dalam aspek modal dan *skill* ini penting dan memang harus dilakukan.

Pemberdayaan Ekonomi (PKL =Warung Makan)

Pemberdayaan ekonomi masyarakat, tidak berarti mengalienasi pengusaha besar atau kelompok ekonomi kuat. Karena pemberdayaan memang bukan menegakan yang lain, tetapi *give power to everybody*. Pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah penguatan bersama, dimana yang besar hanya akan berkembang kalau ada yang kecil dan menengah, dan yang kecil akan berkembang kalau ada yang besar dan menengah.

Daya saing yang tinggi hanya ada jika ada keterkaitan antara yang besar dengan yang menengah dan kecil. Sebab hanya dengan keterkaitan produksi yang adil, efisiensi akan terbangun. Oleh sebab itu, melalui kemitraan dalam bidang permodalan, kemitraan dalam proses produksi, kemitraan dalam distribusi, masing-masing pihak akan diberdayakan.

Penggunaan variabel pemberdayaan ekonomi masyarakat (PKL Warung Makan) sebagai salah satu variabel penjelas dapat meningkatkan pemahaman penduduk untuk meningkatkan pendapatan, sehingga bisa ke luar dari belunggu kemiskinan. Faktor kebijakan Pemerintah dalam bantuan modal dan *skill*, diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam berbagai penganggulan masalah kemiskinan yang sedang berkembang.

Pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan mendorong kehidupan dan perkembangan PKL, termasuk usaha warung makan sangat relevan sekali, karena selain untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari juga mampu menyerap banyak tenaga kerja. Karena ini menyangkut masalah kesejahteraan hidup masyarakat. Demikian halnya seperti yang terlihat keberadaan PKL (Warung Makan) yang telah dikelola oleh PT. Pondok Solo Permai di sepanjang jalan Raya Solo Baru (desa Langenharjo, kec. Grogol).

Keamanan dari para pedagang warung makan tersebut diserahkan dan dijaga oleh LIRA (Lambung Informasi Rakyat). Fungsi LIRA ini antara lain untuk: melindungi pedagang, keamanan parkir, keamanan pengemis, dsb. Guna untuk menjalin hubungan antara pedagang warung makan satu dengan warung makan lainnya, telah diadakan arisan, setiap

hari iuran arisan per warung makan sebesar Rp. 5000,- dan setiap satu minggu sekali diundi di tempat Warung makan secara bergantian. Para pedagang warung makan setiap malam dikenakan retribusi ke PT. PSP sebesar Rp. 3000,- dan ke Dependenda Rp. 1000,-. Sedang untuk parkir dikelola oleh Tender Pemda Dati II Sukoharjo dan barang-barang dititipkan kepada petugas penitipan barang (termasuk gerobak).

Kemampuan untuk berkembang dan bertahan menghadapi persaingan usaha tersebut, disamping didorong faktor ketrampilan dan semangat kerja yang tinggi, juga didorong dengan berperannya modal sosial di antara pedagang warung makan..Modal sosial yang telah berperan pada para pedagang warung makan adalah saling memberikan informasi dan bantuan, baik terkait dengan informasi peluang usaha, lokasi usaha yang strategis, modal usaha, kelompok usaha maupun tempat tinggal.

Dari sisi konsumen, pembeli yang datang ke warung makan, tidak hanya semata-mata didorong oleh motif ekonomi (hanya membeli makanan atau minuman), tetapi juga didorong oleh motif yang lain, yaitu membutuhkan tempat yang nyaman untuk bersantai, mengobrol, dan berdiskusi. Kebanyakan pembeli merasa nyaman untuk singgah berlama-lama di warung makan. Hal tersebut disebabkan, disamping minuman dan jajanan yang disajikan cukup bervariasi dan dapat memesan jajanan yang dibakar, mereka juga dapat memilih tempat duduk yang disukai untuk bersantai, baik di kursi yang telah disediakan ataupun tempat duduk lesehan di trotoar dengan beralaskan tikar.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan seperti yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam rangka pengentasan kemiskinan, tidak cukup hanya dengan pemberian modal secara bergulir, tetapi juga harus ada penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat, penguatan sumberdaya manusianya (*skill*), penyediaan prasarana, dan penguatan posisi tawarnya.
2. Sebelum mereka terjun menjadi PKL, sebagian (40%) mereka bekerja sebagai petani dan buruh tani dengan kehidupan yang sederhana (rumah tempat tinggal semi permanen, kendaraan roda dua setengah pakai dan ada yang belum punya, dan hanya mampu membiayai anak sekolah hingga SLTP atau SLTA), sedang yang lainnya (60%) tidak punya pekerjaan (pengangguran) atau bekerja yang tidak menentu (tidak tetap) dengan kehidupan masuk dalam kategori miskin.

3. Setelah mereka terjun menjadi PKL (Warung Makan) kehidupan mereka berangsur-angsur membaik dan sekarang sudah menjadi hidup sejahtera (punya tempat tinggal layak atau permanen, punya kendaraan bahkan banyak yang sudah punya mobil, penghasilan tetap, dan mampu membiayai anak sekolah hingga Perguruan Tinggi).
4. Dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat (PKL=Warung Makan) tidak cukup hanya dengan pemberian modal secara bergulir, tetapi juga harus penguatan sumberdaya manusianya (*skill*), penyediaan prasarana, dan kemitraan antar usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar.
5. Terbentuknya kelompok PKL berupa warung makan yang mandiri. Tempat berjualan mereka di pinggir-pinggir jalan (trotoar) pada waktu sore sampai dengan malam hari, dengan memasang tenda-tenda.
6. Keberadaan Warung Makan/Wedangan/HIK hampir setiap malam dipadati oleh pengunjung, baik dengan mobil maupun sepeda motor, seperti: wedangan Pak Item, Pak Gendut, nasi liwet Yu Sani, Ayam bakar Mantili, dan masih banyak lagi yang lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Bappenas. 2012. *“Long-term Issues & Priorities”*. Bappenas/Unsifir Discussion Paper. Juli.
- Blakely, Edward J. and Ted K. Bradshaw. 2012. *“Planning Local Economic Development”*, Edisi Ketiga, SAGE Publication, California.
- Blank, R.M. 2004. *“Poverty, Policy and Place: How Poverty and Policies to Alleviate Poverty are Shaped by Local Characteristics”*. *RPRC Working Paper 04-02*.
- Blundell R. and Steve Bond. 2000. *“GMM Estimation with Persistent Panel Data: An Application to Production Function”*, *Econometric Reviews*.
- Danusaputro, M. 2006. *“Strategi, Perencanaan dan Evaluasi Pengentasan Kemiskinan”*, *Seri Kajian Fiskal dan Moneter*, No.6.
- Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota. 2012. Badan Pusat Statistik, Jakarta.
- Fitchen, Janet M. 2005. *“Spatial Redistribution of Poverty Through Migration of Poor People to Depressed Rural Communities”*. *Rural Sociology*. 59. (1): 66-83.
- Fofack, H. and C. Monga. 2004. *“Dynamics of Income Inequality and Welfare in Latvia in the Late 1990s”*, *World Bank Policy Research Working Paper*. 3336.
- Foster, J.J. Greer, and E. Thorbecke. 2004. *“A Class of Decomposable Poverty Measure”*. *Econometrica*. Vol. 25: 761-766.

- Ginandjar Kartasasmita. 1996. “*Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Kemitraan Guna Mewujudkan Ekonomi Nasional Yang Tangguh dan Mandiri*”, LP2KMK-Golkar, Jakarta.
- Gillis, M., Dwight H. Perkins, Michael Roemer and Donald R. Snodgrass. 2006. “*Economics of Development*”. Edisi Keempat. W.W. America: Norton & Company.
- Hertina. 2008. “Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Zakat di Kabupaten Kampar”, *Hukum Islam*, Vol. VIII, No.2.
- Jhingan, M. L. 2003. “*Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*”. Cetakan Kesembilan. Jakarta: Raja Grafindo.
- Kankwenda, M. L. Gregoire, H. Legros, 2000, *Poverty Eradication: Where Stands Africa? Economica*, London.
- Kraay, A. 2004. “When Is Growth Pro-Poor? Cross-Contry Evidence”, *World Bank Policy Research Working Paper*.3225.
- Miranti, R., dan B.P. Resosudarmo. 2004. “Understanding Regional Poverty in Indonesia: Is Poverty Worse in The East Than in the West?” *The 6th IRSA International Coference*, August, Jakarta.
- Sartono dkk. 2009, “*Strategi Kebijakan Berbasis Karakteristik Lokal Dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan di Jawa Tengah*”, Semarang.
- Sumodiningrat, G. 2002. “*Sinkronisasi Program Penanggulangan Kemiskinan*”. Lembaga Pengabdian Masyarakat UGM.
- Sukoharjo Dalam Angka. 2012. Kantor Statistik Kabupaten Sukoharjo.
- World Bank. 2005. “*Indonesia Policy Briefs, Kredit untuk Penduduk Miskin*”, <http://www.world bank.or.id>.